

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Taman Pondok Jati yang berlangsung pada 29 September hingga 1 November 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKPA di Apotek Pahala Taman Pondok Jati memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, pemusnahan obat, serta pelayanan resep dan swamedikasi.
2. Kegiatan PKPA ini memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi calon apoteker dalam menguasai keterampilan kefarmasian, baik di bidang manajerial maupun pelayanan farmasi klinik, dengan penekanan pada ketelitian, tanggung jawab, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya di apotek.
3. Program PKPA juga menjadi wadah pengembangan diri bagi calon apoteker dengan menanamkan nilai-nilai PEKA (Peduli, Komit, dan Antusias), serta membangun kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan berinteraksi dengan rekan sejawat.
4. Selain itu, kegiatan PKPA di Apotek Pahala memberikan wawasan mengenai strategi pendirian dan pengelolaan apotek, sehingga mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan beretika.

5.2 Saran

Setelah pelaksanaan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sebelum mengikuti kegiatan PKPA, mahasiswa calon apoteker disarankan untuk melakukan persiapan yang lebih optimal, agar selama program berlangsung mampu memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik serta berinteraksi secara efektif dengan pasien dan masyarakat.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya selalu mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian, serta mengikuti perkembangan ilmu dan informasi terbaru di dunia farmasi, guna mendukung pelaksanaan praktik kefarmasian yang profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health-System Pharmacists. (2021). *AHFS Drug Information 2021*. Bethesda, MD: ASHP.
- Badan POM RI. (2025). *Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik*. Jakarta: Badan POM RI.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Joint Formulary Committee. (2022). *British National Formulary (BNF) 2022*. London: BMJ Group & Pharmaceutical Press.
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes 889/2011*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016 (Nomor tidak disebutkan)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2017 (Nomor tidak disebutkan)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. (1990). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek No. 2*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Menteri Kesehatan RI. (1993). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.5.7*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. (2023). *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Pediatric Formulary Committee. (2023). *BNF for Children 2023*. London: BMJ Group & Pharmaceutical Press.